

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kondisi Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

5.1.1 Analisis Persentase Penduduk Miskin Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Kemiskinan sebagai suatu keadaan yang dimana masyarakat kekurangan pendapatan dan kesulitan dalam bidang perekonomian. Kemiskinan juga dipandang sebagai keadaan yang di mana kurangnya akses pendidikan, kesehatan, dan air minum yang bersih. UNDP memandang tingkat kemiskinan adalah suatu problematika multidimensi yakni tidak hanya sebatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi (UNDP, 2023). Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi, sehingga membutuhkan kebijakan dan intervensi program yang juga bersifat multidimensi agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan masyarakat dari garis kemiskinan. Kondisi penduduk miskin Provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5. 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P0) %											Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	17,72	16,98	17,08	16,73	16,89	15,97	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45	16,01
Sumatera Utara	10,39	9,85	10,53	10,35	10,22	9,22	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15	9,43
Sumatera Barat	7,56	6,89	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95	6,69
Riau	8,42	7,99	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68	7,50
Jambi	8,41	8,39	8,86	8,41	8,19	7,92	7,60	7,58	8,09	7,62	7,58	8,06
Sumatera Selatan	14,06	13,62	14,25	13,54	13,19	12,80	12,71	12,66	12,84	11,90	11,78	13,03
Bengkulu	17,75	17,09	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	16,01
Lampung	14,39	14,21	14,35	14,29	13,69	13,14	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11	13,12
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25	4,62	4,53	4,90	4,45	4,52	4,94
Kepulauan Riau	6,35	6,40	6,24	5,98	6,06	6,20	5,90	5,92	6,12	6,24	5,69	6,10
Rata-rata	11,03	10,64	11,03	10,69	10,45	10,00	9,63	9,49	9,79	9,22	9,00	10,09

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data pada tabel 5.1, terlihat bahwa provinsi di Sumatera yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2013 yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 17,75% dan terendah dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,25%. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Bengkulu dengan nilai 17,09% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,97%. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Bengkulu dengan nilai 17,88% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,40%. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Bengkulu dengan nilai 17,32% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,22%.

Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Aceh dengan nilai 16,89% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,20%. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Aceh dengan nilai 15,97% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,25 %. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Aceh dengan nilai 15,32% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,62%. Pada tahun 2020 Persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Bengkulu dengan nilai 15,03% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar - 4,53%.

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Aceh dengan nilai 15,33% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,90%. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Aceh dengan nilai 14,64% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,45%. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin tertinggi dialami Provinsi Aceh dengan nilai 14,45% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,52%. Rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi selama tahun 2013-2023 yaitu dialami Provinsi Aceh sebesar 16,01%, dan rata-rata persentase penduduk miskin terendah selama periode 2013-2023 dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,94%. Rata-rata

persentase penduduk miskin Provinsi-provinsi di Sumatera selama tahun 2013-2023 sebesar 10,09%

Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geografis yang rawan bencana, kondisi sosial yang rawan konflik yang berdampak pada perekonomian, angka pengangguran yang relatif tinggi, pengelolaan sumber daya alam masih belum optimal, tata kelola yang masih kurang baik sehingga menghambat pembangunan, minimnya investasi swasta baik domestik maupun asing, birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum dan stereotip bahwa Aceh masih belum aman dan memberlakukan hukum syariah Islam yang ketat.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan rata-rata persentase penduduk miskin terendah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi yang membaik, kaya akan sumber daya alam terutama timah yang menjadi penggerak utama perekonomian, sektor pertambangan dan perdagangan yang maju, laju inflasi yang terkendali, angka pengangguran yang relatif rendah, pendapatan daerah yang meningkat dan pemerintah yang relatif efektif dalam mengelola sumber daya daerah dan melaksanakan program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.1.2 Analisis Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu ukuran standar yang dapat mendeskripsikan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu daerah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Nilai indeks berada pada interval 0-10 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progres pembangunan TIK suatu wilayah lebih optimal, begitupun sebaliknya. Kondisi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5. 2 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Provinsi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)											Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	3,87	3,92	3,28	3,41	4,49	4,66	4,91	5,27	5,54	5,60	5,88	4,62
Sumatera Utara	4,11	4,09	3,38	3,69	4,65	4,94	5,19	5,44	5,75	5,90	6,04	4,83
Sumatera Barat	4,44	4,40	3,86	4,24	5,00	5,12	5,25	5,52	5,92	6,01	6,12	5,08
Riau	4,39	4,49	3,95	4,26	5,08	5,25	5,33	5,74	5,90	6,02	6,07	5,13
Jambi	4,23	4,22	3,70	3,92	4,66	4,91	5,17	5,49	5,73	5,80	5,92	4,89
Sumatera Selatan	4,03	4,17	3,46	3,80	4,63	4,81	4,91	5,30	5,64	5,76	5,88	4,76
Bengkulu	4,26	4,38	3,72	3,93	4,78	4,88	5,21	5,50	5,85	5,95	6,04	4,95
Lampung	3,62	3,67	3,01	3,32	4,20	4,50	4,83	5,15	5,58	5,63	5,78	4,48
Kepulauan Bangka Belitung	4,09	4,13	3,70	4,00	4,70	4,89	5,25	5,54	5,71	5,82	5,95	4,89
Kepulauan Riau	6,46	6,30	5,15	5,59	5,89	6,14	6,36	6,46	6,58	6,69	6,66	6,21
Rata-rata	4,35	4,38	3,72	4,02	4,81	5,01	5,24	5,54	5,82	5,92	6,03	4,99

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data pada tabel 5.2, terlihat provinsi di Sumatera yang memiliki Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) tertinggi pada tahun 2013 yaitu Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,46 dan terendah dialami Provinsi Lampung sebesar 3,62. Pada tahun 2014, IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 6,30 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar 3,67. Pada tahun 2015, IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 5,15 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar 3,01. Pada tahun 2016, IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 5,59 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar 3,32.

Pada tahun 2017 IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 5,89 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar 4,20. Pada tahun 2018 IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 6,14 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar 4,50. Pada tahun 2019 IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 6,36 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar 4,83. Pada tahun 2020 IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,46 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar 5,15.

Pada tahun 2021 IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 6,58 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Aceh sebesar 5,54. Pada tahun 2022 IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 6,69 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Aceh sebesar 5,60. Pada tahun 2023 IP-TIK tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 6,66 dan provinsi terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar 5,78. Rata-rata IP-TIK tertinggi selama tahun 2013-2023 yaitu dialami Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,21, dan rata-rata IP-TIK terendah selama periode 2013-2023 dialami Provinsi Lampung sebesar 4,48. Rata-rata IPTIK Provinsi-provinsi di Sumatera selama tahun 2013-2023 sebesar 4,99.

Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan IPTIK tertinggi di Sumatera disebabkan oleh infrastruktur TIK yang memadai serta kemampuan penduduk yang baik dalam mengakses dan menggunakan TIK. Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat 7 Nasional sebagai destinasi investasi industri teknologi digital. Informasi dari *website* pemerintahan Kepulauan Riau menjelaskan bahwa

di Kepulauan Riau ditemukan semakin banyak penduduk yang bergantung pada internet dalam pekerjaan atau menjalankan usahanya. Selain itu, faktor kedekatan Kepulauan Riau dengan Singapura menjadikan provinsi ini sebagai tujuan investasi digital. Sementara Provinsi Lampung memiliki IPTIK terendah di Sumatera disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur TIK serta kemampuan penduduk yang masih terbatas.

5.1.3 Analisis Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal. Kondisi Akses sanitasi layak Provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel 5.3

Tabel 5. 3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)											Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	53,47	33,68	54,68	62,68	63,38	67,09	73,16	77,06	77,55	77,48	78,85	65,37
Sumatera Utara	61,92	66,92	67,89	72,86	73,00	74,60	79,59	81,08	82,02	82,30	84,18	75,12
Sumatera Barat	46,13	42,34	45,02	53,24	52,77	56,85	63,98	68,11	68,68	69,27	70,97	57,94
Riau	63,44	48,74	51,30	71,36	70,04	71,48	80,04	83,99	83,64	84,06	84,58	72,06
Jambi	58,53	58,58	58,21	65,65	64,20	63,99	75,60	77,82	80,36	79,54	83,04	69,59
Sumatera Selatan	51,66	59,79	61,30	65,05	66,36	68,60	74,67	76,94	77,29	78,62	80,54	69,17
Bengkulu	32,37	33,18	39,22	49,75	42,71	44,31	75,91	78,10	79,81	79,58	80,28	57,75
Lampung	45,86	37,27	44,83	58,58	52,89	52,48	79,22	78,81	83,89	83,65	84,58	63,82
Kepulauan Bangka Belitung	77,95	75,67	80,80	83,16	83,56	85,64	90,32	92,58	92,24	91,63	93,21	86,07
Kepulauan Riau	71,95	63,45	71,97	79,55	86,33	85,07	89,13	89,19	91,62	87,74	91,10	82,46
Rata-rata	56,33	51,96	57,52	66,19	65,52	67,01	78,16	80,37	81,71	81,39	83,13	69,94

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data pada tabel 5.3, terlihat provinsi di Sumatera yang memiliki persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi pada tahun 2013 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 77,95% dan terendah dialami Provinsi Bengkulu sebesar 32,37 %. Pada tahun 2014 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 75,67% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 33,18%. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 80,80% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 39,22%. Pada tahun 2016 persentase akses sanitasi layak dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 83,16% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 49,75%.

Pada tahun 2017 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 86,33% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 42,7%. Pada tahun 2018 persentase akses sanitasi layak tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 85,64% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 44,31%. Pada tahun 2019 persentase akses sanitasi layak tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 90,32% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 63,98%. Pada tahun 2020 Persentase akses sanitasi layak tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 92,58% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 68,11%.

Pada tahun 2021 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 92,24% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 68,68%. Pada tahun 2022 persentase akses sanitasi layak tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 91,63% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 69,27%. Pada tahun 2023 persentase akses sanitasi layak tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 93,21% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 70,97%. Rata-rata persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi selama tahun 2013-2023 yaitu dialami

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 86,07%, dan rata-rata persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak terendah selama periode 2013-2023 dialami Provinsi Bengkulu sebesar 57,75%. Rata-rata persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak Provinsi-provinsi di Sumatera selama tahun 2013-2023 sebesar 69,94%.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi disebabkan oleh sebagian besar daratan rendah yang memudahkan pembangunan infrastruktur sanitasi seperti sistem pembuangan limbah dan tangki septik, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang lebih baik, kesadaran sanitasi masyarakat yang baik dan persentase penduduk miskin yang rendah sehingga memungkinkan rumah tangga memiliki kemampuan dalam membangun fasilitas sanitasi.

Provinsi Bengkulu memiliki persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak terendah disebabkan oleh kondisi geografis yang menyulitkan pembangunan infrastruktur sanitasi, pendapatan yang rendah menjadi hambatan bagi rumah tangga untuk berinvestasi dalam fasilitas sanitasi layak, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak.

5.1.4 Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja (BPS, 2023). TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)											Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	10,12	9,02	9,93	7,57	6,57	6,34	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03	7,35
Sumatera Utara	6,45	6,23	6,71	5,84	5,60	5,55	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89	6,10
Sumatera Barat	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94	6,16
Riau	5,48	6,56	7,83	7,43	6,22	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23	5,87
Jambi	4,76	5,08	4,34	4,00	3,87	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53	4,47
Sumatera Selatan	4,84	4,96	6,07	4,31	4,39	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	4,78
Bengkulu	4,61	3,47	4,91	3,30	3,74	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42	3,76
Lampung	5,69	4,79	5,14	4,62	4,33	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,61
Kepulauan Bangka Belitung	3,65	5,14	6,29	2,60	3,78	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56	4,39
Kepulauan Riau	5,63	6,69	6,20	7,69	7,16	8,04	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	7,65
Rata-rata	5,83	5,84	6,43	5,25	5,12	5,06	4,97	6,17	5,69	5,33	4,97	5,51

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data pada tabel 5.4, terlihat provinsi di Sumatera yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada tahun 2013 yaitu Provinsi Aceh sebesar 10,12% dan terendah dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,65%. Pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi dialami Provinsi Aceh dengan nilai 9,02% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 3,47%. Pada tahun 2015 TPT tertinggi dialami Provinsi Aceh dengan nilai 9,93% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Jambi sebesar 4,34%. Pada tahun 2016 TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 7,69% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,60%.

Pada tahun 2017 TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 7,16% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 3,74%. Pada tahun 2018 TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 8,04% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 3,35 %. Pada tahun 2019 TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 7,50% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 3,26%. Pada tahun 2020 TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 10,34% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 4,07%.

Pada tahun 2021 TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 9,91% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 3,65%. Pada tahun 2022 TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 8,23% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 3,59%. Pada tahun 2023 TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 6,80% dan provinsi terendah yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 3,42%. Rata-rata TPT tertinggi selama tahun 2013-2023 yaitu dialami Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,65%, dan rata-rata TPT terendah selama periode 2013-2023 dialami Provinsi Bengkulu sebesar 3,76%. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera selama tahun 2013-2023 sebesar 5,51%.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata TPT tertinggi di Sumatera disebabkan oleh banyaknya pulau di Kepulauan Riau yang dapat menjadi tantangan dalam penyediaan lapangan kerja dan akses-akses ke pusat ekonomi, kepulauan Riau menjadi pintu masuk pekerja migran Indonesia dari luar negeri dan banyak

pekerja migran yang memilih menetap dan mencari pekerjaan di Kepulauan Riau sehingga tenaga migran yang tidak terserap akan menganggur.

Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata TPT terendah di Sumatera disebabkan oleh mayoritas angkatan kerja bekerja disektor informal, buruh, pertanian dan perkebunan sehingga penduduk memiliki lapangan pekerjaan yang pada akhirnya mengurangi pengangguran.

5.2 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase Penduduk Miskin Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

5.2.1 Pemilihan Model Estimasi Terbaik

Pengujian Spesifikasi model untuk memilih model terbaik dalam regresi data panel terdiri atas tiga pengujian yakni uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier.

Tabel 5. 5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1044.249056	(9,97)	0.0000
Cross-section Chi-square	504.221859	9	0.0000

Sumber: Eviews 10 (2025), Data Diolah

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian Uji Chow ini adalah:

- Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model FEM lebih baik dibandingkan model CEM
- Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya model CEM lebih baik dibandingkan model FEM.

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa F test maupun Chi-Square memiliki nilai Probability 0,0000 ($0,0000 < 0,05$), sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa FEM lebih baik dibandingkan CEM. Oleh sebab itu, pengujian berikutnya dilakukan dengan membandingkan metode FEM atau REM menggunakan uji hausman.

Tabel 5. 6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.403602	3	0.2211

Sumber: Eviews 10 (2025), Data Diolah

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pemilihan Uji Hausman yaitu:

- Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model FEM lebih baik dibandingkan model REM.
- Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya model REM lebih baik dibandingkan model FEM.

Berdasarkan output Eviews menunjukkan bahwa nilai Probability 0,2211 ($0,2211 > 0,05$). Sehingga hipotesis H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa REM lebih baik dibandingkan FEM. Selanjutnya Uji Lagrange Multiplier digunakan dalam menentukan metode mana yang terbaik antara CEM dan REM.

Tabel 5. 7 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 04/19/25 Time: 21:04
Sample: 2013 2023
Total panel observations: 110
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	439.0867 (0.0000)	0.458636 (0.4983)	439.5454 (0.0000)

Sumber: Eviews 10 (2025), Data Diolah

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pemilihan Uji Lagrange Multiplier yaitu:

- a) Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya REM lebih baik dibandingkan CEM.
- b) Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya CEM lebih baik dibandingkan REM.

Dari hasil output Uji LM, terlihat bahwa prob. Breusch-Pagan sebesar 0,0000 (kolom Both). Sesuai hipotesis jika probability Breusch Pagan (0,0000) $< 0,05$ maka H_1 diterima, oleh karena itu model terbaik adalah *Random Effect Model* (REM).

5.2.2 Hasil Estimasi Model Terpilih Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier model terbaik yang terpilih yaitu *Random Effect Model* maka dari itu penelitian ini akan menggunakan model *Random Effect Model* sebagai model dalam penelitian.

Tabel 5. 8 Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.79353	1.199702	11.49746	0.0000
IPTIK?	-0.505384	0.076676	-6.591149	0.0000
ASL?	-0.026022	0.004906	-5.303835	0.0000
TPT?	0.114879	0.040596	2.829811	0.0056
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	5.402921			
_SUMUT--C	-0.665973			
_SUMBAR--C	-3.734135			
_RIAU--C	-2.499355			
_JAMBI--C	-1.965749			
_SUMSEL--C	2.893055			
_BENGKULU--C	5.781052			
_LAMPUNG--C	2.720198			
_KEPBABEL--C	-4.645291			
_KEPRI--C	-3.286721			

Sumber: Eviews 10 (2025), Data Diolah

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model*, maka variabel dependen dan independen dapat dijelaskan melalui model sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPTIK_{it} + \beta_2 ASL_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$TK_{it} = 13.79353 - 0.505384IPTIK_{it} - 0.026022ASL_{it} + 0.114879TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan persamaan model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 13.79353, apabila variabel IPTIK (Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi), ASL (persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak), dan TPT (tingkat pengangguran terbuka) tetap maka TK (Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin)) Provinsi-provinsi di Sumatera adalah sebesar 13,79 persen.
2. Nilai koefisien regresi data panel IPTIK (Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebesar -0.505384 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap atau konstan maka dapat diartikan ketika variabel IPTIK meningkat 1 poin maka Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) Provinsi-provinsi di Sumatera mengalami penurunan sebesar 0,50 persen.
3. Nilai koefisien regresi data panel ASL (persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak) sebesar -0.026022 dengan probabilitasnya sebesar 0.0000 lebih kecil dari Tingkat $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0,05$) artinya variabel Akses Sanitasi Layak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin) Provinsi-provinsi di Sumatera dengan asumsi jika variabel independent lainnya tetap atau konstan maka dapat diartikan Ketika variabel ASL meningkat 1 persen maka Tingkat Kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera mengalami penurunan sebesar 0,026 persen.
4. Nilai koefisien regresi data panel TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 0.114879 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap atau konstan maka dapat diartikan Ketika variabel TPT meningkat 1 persen maka Tingkat Kemiskinan (Persentase penduduk miskin) Provinsi – provinsi di Sumatera meningkat sebesar 0,11 persen.

Kemudian diperoleh nilai konstanta akhir masing-masing Provinsi-provinsi di Sumatera. Nilai konstanta akhir merupakan penjumlahan dari konstanta persamaan umum dengan konstanta masing-masing provinsi di Sumatera. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.9 berikut:

Tabel 5. 9 Nilai Konstanta Akhir Provinsi-Provinsi di Sumatera

Variable	Konstanta Akhir (C+Ci)
Random Effects (Cross)	
_ACEH--C	19.196451
_SUMUT--C	13.127557
_SUMBAR--C	10.059395
_RIAU--C	11.294175
_JAMBI--C	11.827781
_SUMSEL--C	16.686585
_BENGKULU--C	19.574582
_LAMPUNG--C	16.513728
_KEPBABEL--C	9.148239
_KEPRI--C	10.506809

Sumber: Eviews 10 (2025), Data Diolah

Nilai konstanta akhir Provinsi Aceh sebesar 19.196451 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Aceh adalah sebesar 19.19 persen. Nilai konstanta akhir Provinsi Sumatera Utara sebesar 13.127557 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 13.12 persen. Nilai konstanta akhir Provinsi Sumatera Barat sebesar 10.059395 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 10.05 persen.

Nilai konstanta akhir Provinsi Riau sebesar 11.294175 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Riau adalah sebesar 11.29 persen. Nilai konstanta akhir Provinsi Jambi sebesar 11.827781 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi adalah sebesar 11.82 persen.

Nilai konstanta akhir Provinsi Sumatera Selatan sebesar 16.686585 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 16.68 persen. Nilai konstanta akhir Provinsi Bengkulu sebesar 19.574582 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu adalah sebesar 19.57 persen.

Nilai konstanta akhir Provinsi Lampung sebesar 16.513728 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung adalah sebesar 16.51 persen. Nilai konstanta akhir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 9.148239 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 9.14 persen. Nilai konstanta akhir Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10.506809 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka diasumsikan tetap maka Tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 10.50 persen.

5.2.3 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pemilihan model regresi pada tabel 5.7 diketahui hasil model regresi yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model*. Model *Random Effect* menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS). Pada pendekatan GLS ini tidak menggunakan uji asumsi klasik karena sudah dianggap *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena sudah BLUE.

Hal ini seperti pada pernyataan (Gujarati & Porter, 2009:376) yang menyatakan bahwa “*Although we have stated that, cases of heteroskedasticity, it is the GLS, not the OLS that is BLUE, there are examples where OLS can be BLUE, despite heteroscedasticity.*” Pernyataan ini dapat diartikan bahwa pada kasus heteroskedastisitas yang dikatakan BLUE adalah GLS bukan OLS, meskipun ada beberapa contoh OLS dapat menjadi BLUE meskipun terkena heteroskedastisitas. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas dalam pendekatan GLS sudah BLUE. Sehingga pendekatan GLS tidak memerlukan uji heteroskedastisitas.

Tidak hanya pada heteroskedastisitas, autokorelasi pada pendekatan GLS juga tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Gujarati & Porter, 2009: 422) yaitu “*As the reader can see, the GLS estimator of β_2 given in Eq. (12.3.1) incorporates the autocorrelation parameter ρ in the estimating formula, whereas the OLS formula given in Eq. (12.2.6) simply neglects it. Intuitively, this is the reason why the GLS estimator is BLUE and not the OLS estimator the GLS estimator makes the most use of the available information.*” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan GLS, uji autokorelasi telah dianggap BLUE. Hal ini karena estimasi pada GLS menggabungkan parameter autokorelasi pada formula estimasinya, sedangkan formula OLS pada estimasi mengabaikan parameter autokorelasi. Sehingga pada penelitian ini tidak memerlukan uji autokorelasi karena sudah dianggap BLUE. Penggunaan metode GLS dapat menekan autokorelasi yang biasanya timbul dalam rumus OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai akibat dari kesalahan estimasi varians (Gujarati, 2003).

Verbeek (2002), Gujarati (2003), Wibisono (2005), Aulia (2004:27) dalam buku (Ajija et al., 2011:52) menyimpulkan bahwa “keunggulan lain pada data panel yaitu data panel memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik”, maka data panel tidak membutuhkan pengujian normalitas. Penjelasan mengapa tidak membutuhkan pengujian normalitas yaitu uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah *Error term* mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30 maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi sampling *Error term* mendekati normal (Ajija et al., 2011:42). Dalam penelitian ini menggunakan jumlah observasi 110, maka uji normalitas dapat diabaikan.

Pernyataan (Gujarati & Porter, 2009:372) “*In short, GLS is OLS on the transformed variabls that satisfy the standard least-squares assumptions. The estimators thus obtained are known as GLS estimators, and it is these estimators that are BLUE.*” Yang berarti bahwa pendekatan GLS merupakan transformasi variabel OLS yang telah memenuhi standar asumsi *least square* sehingga dianggap telah BLUE. Dengan demikian, pada penelitian ini tidak menggunakan uji asumsi klasik karena pada penelitian ini menggunakan model *random effect* dengan pendekatan GLS yang sudah dianggap BLUE.

5.2.4 Pengujian Hipotesis

Tabel 5. 10 Hasil Uji F

R-squared	0.792101	Mean dependent var	0.310395
Adjusted R-squared	0.786217	S.D. dependent var	0.801974
S.E. of regression	0.370807	Sum squared resid	14.57473
F-statistic	134.6207	Durbin-Watson stat	1.277733
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 10 (2025), Data Diolah

Berdasarkan hasil regresi *Random Effect Model* diatas, terlihat bahwa F-statistik sebesar 134.6207 dengan probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 ($0.000000 < 0.05$), artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara IPTIK (Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, ASL (Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, dan TPT (Tingkat

Pengangguran Terbuka) terhadap Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin) Provinsi-provinsi di Sumatera.

Tabel 5. 11 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.79353	1.199702	11.49746	0.0000
IPTIK	-0.505384	0.076676	-6.591149	0.0000
ASL	-0.026022	0.004906	-5.303835	0.0000
TPT	0.114879	0.040596	2.829811	0.0056

Sumber: Eviews 10 (2025), Data Diolah

Uji statistik t ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) diketahui bahwa:

1. Diketahui bahwa nilai t-statistik variabel IPTIK (Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi) yaitu sebesar -6.591149 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 ($0.0000 < 0,05$), artinya IPTIK (indeks teknologi informasi dan komunikasi) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) Provinsi-provinsi di Sumatera.
2. Diketahui nilai t-statistik variabel ASL (Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak) yaitu sebesar -5.303835 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 ($0.0000 < 0,05$), artinya ASL (Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) Provinsi-provinsi di Sumatera.
3. Diketahui nilai t-statistik variabel TPT (Tingkat pengangguran terbuka) yaitu sebesar 2.829811 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0056 ($0.0056 < 0.05$), artinya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) Provinsi-provinsi di Sumatera.

5.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil regresi metode *Random Effect Model* (REM) diperoleh nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.792101, artinya variasi perubahan (naik/turunnya) variabel Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin) Provinsi-provinsi di Sumatera selama periode 2013-2023 mampu dijelaskan dengan baik oleh variabel Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Akses Sanitasi Layak dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 79,21% sedangkan sisanya sebesar 20,79% dijelaskan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5.2.6 Pembahasan dan Interpretasi Hasil

1. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan *Random Effect Model*, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera, dengan nilai koefisien sebesar -0.505384 dan Probabilitas sebesar 0.0000 ($0.0000 < 0.05$). Artinya menandakan bahwa IPTIK merupakan salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan menurun. Ketika IPTIK naik 1 satuan maka tingkat kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera akan turun sebesar 0,50%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Khoirunnisa & Budiarti, 2019) dan (Israel, 2021) bahwa IP-TIK berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Hariani & Ekaria, 2023) dan (Mora-Rivera & García-Mora, 2021) memperkuat hasil penelitian ini bahwa akses internet berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Hal tersebut dapat dijelaskan karena dengan adanya pembangunan TIK dapat menjadi sumber informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah masyarakat termasuk masyarakat miskin untuk memiliki peluang yang lebih baik dalam meningkatkan kondisi ekonominya. Teknologi informasi dan komunikasi membantu setiap individu mendapatkan informasi tentang lapangan pekerjaan, pelatihan, pendidikan dan dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan efisien yang memungkinkan para pelaku

UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan akses modal sehingga akan menambah pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan.

2. Pengaruh Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan *Random Effect Model*, Akses Sanitasi Layak berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera, dengan nilai koefisien sebesar -0.026022 dan Probabilitas sebesar 0.0000 ($0.0000 < 0.05$). Artinya menandakan bahwa Akses Sanitasi Layak merupakan salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan menurun. Ketika Akses Sanitasi Layak naik 1% maka tingkat kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera menurun sebesar 0,026%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Kamilia, 2022) dan penelitian (Andrianus & Alfatih, 2023) bahwa sanitasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian diperkuat oleh penelitian (Adhitya et al., 2022) dan penelitian (Putra, 2024) yang juga menjelaskan hasil yang sama.

Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan karena semakin baik Pembangunan sanitasi yang dalam hal ini diukur menggunakan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, maka peluang masyarakat untuk sehat meningkat yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan. Untuk mencapai derajat kesehatan yang berkualitas diperlukan fasilitas kesehatan dan akses sanitasi yang baik. Individu yang memiliki kesehatan baik akan meningkatkan produktifitasnya dan dapat memperoleh pendapatan yang tinggi dan pada akhirnya dapat mengurangi persentase penduduk miskin.

3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan *Random Effect Model*, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera dengan nilai koefisien sebesar 0.114870 dan Probabilitas sebesar 0.0056 ($0.0056 < 0.05$). Artinya menandakan bahwa TPT merupakan salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan. Ketika Tingkat Pengangguran Terbuka naik 1% maka tingkat

kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera akan naik 0,11%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Kamilia, 2022) dan penelitian (Reyza Syuhada et al., 2024) bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian (Sembiring, 2020) dan penelitian (Deviyanti, 2024) bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan karena pengangguran dapat diartikan sebagai rendahnya produktifitas seseorang. Hal ini dikarenakan pengangguran tidak melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan upah yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin banyak pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan karena individu tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga kebutuhan hidup tidak akan terpenuhi dan akan menurunkan kesejahteraan.

5.3 Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengurangi kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera. Sehingga kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu: (1) meningkatkan dan pemerataan pembangunan TIK terutama di daerah pedesaan yang belum memiliki akses TIK yang memadai dan pada gilirannya dapat meningkatkan konektivitas dan akses informasi dalam mendapatkan informasi pekerjaan maupun pelatihan. (2) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan penggunaan teknologi terutama kepada masyarakat yang kurang terampil. Kebijakan ini dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Penelitian variabel akses sanitasi layak menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap Tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan akses sanitasi layak dapat mengurangi kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera. Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan yaitu: (1) pemerintah dapat membangun dan meningkatkan serta

melakukan perbaikan infrastruktur sanitasi, seperti sistem penyediaan air bersih, sistem pengolahan limbah, pembangunan fasilitas sanitasi seperti toilet umum. (2) pemerintah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak dan memberikan pemahaman tentang prasyarat untuk membangun toilet di setiap rumah tangga serta pengolahan limbah yang aman terutama kepada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan terpencil yang masih minim kesadaran akan kesehatan. (3) pemerintah dapat memberikan subsidi kepada rumah tangga yang ingin membangun dan memperbaiki fasilitas sanitasinya sehingga rumah tangga yang memiliki keterbatasan ekonomi bisa meningkatkan sanitasinya yang layak.

Penelitian variabel Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan Tingkat pengangguran terbuka dapat meningkatkan kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera. Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan yaitu: (1) mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang akan membuat individu lebih memiliki daya saing di pasar tenaga kerja sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan produktifitas individu. (2) Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dan bantuan kewirausahaan kepada masyarakat agar lebih banyak orang yang memulai usaha sendiri, hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang sulit menemukan lapangan pekerjaan (3) Pemerintah juga perlu menyelenggarakan bursa kerja agar mempermudah masyarakat mencari pekerjaan. (4) Pemerintah perlu mempermudah syarat kerja, dan penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuannya.